

BAB II

HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DENGAN JEPANG

Bab ini merupakan penjabaran substansi mengenai dinamika hubungan Indonesia-Jepang, bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Jepang serta latar belakang terciptanya isu yang akan dibahas. Penjelasan substansi yang akan diberikan penulis mencakup sejarah hubungan Indonesia dengan Jepang, bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, budaya, pariwisata dan pendidikan, serta bentuk kerjasama yang menyebabkan isu ini terjadi. Penjabaran meliputi dua hal yaitu, pemaparan mengenai kondisi secara riil di domestik pada bidang yang sudah disebutkan penulis sebelumnya beserta potensi yang didapat oleh kedua negara antara Indonesia dengan Jepang. Dengan hal ini, maka bab ini akan memberikan gambaran mengenai bentuk kerjasama apa saja yang dilakukan antara Indonesia dengan Jepang yang kemudian berpotensi dalam kerjasama dalam perdagangan karbon.

A. SEJARAH HUBUNGAN INDONESIA DENGAN JEPANG

Hubungan Indonesia-Jepang telah terlacak jauh sebelum kemerdekaan Indonesia Agustus 1945. Sejak akhir abad ke-19M Indonesia dengan Jepang sudah memulai hubungan, tetapi dalam hubungan ini orang-orang Jepang lebih berperan aktif dibandingkan dengan orang-orang Indonesia yang hanya sebagai aktor pasif. Dalam rentan waktu selama lebih dari satu abad, motif utama dari kerjasama kedua negara tersebut adalah ekonomi. Barulah menjelang akhir paruh pertama abad ke-20 motif politik (ekspansi) mulai timbul dengan kepercayaan diri

yang dimiliki Jepang yang saat itu sedang maju sangat pesat, khususnya dalam bidang industri dan militernya.

1. Periode Sebelum Tahun 1945

Pada saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda, hubungan yang terjalin antara orang-orang Belanda dengan Jepang adalah sebatas hubungan perdagangan. Pada masa sebelum abad kaisar Meiji memimpin, Jepang dengan Politik negara Isolasi (*sakoku*) menerapkan kebijakan hanya melakukan hubungan dagang dengan VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) yang merupakan kongsi dagang dari Belanda yang beridiri pada 1602 dari perseroan dagang yang tadinya saling bersaing untuk memonopoli perdagangan di Asia dan Hindia Timur.

Pandangan Kaisar Meiji (1862—1912) yang terbuka terhadap dunia Barat merupakan dasar dari berbagai perubahan yang dibawanya. Ia melihat pesatnya kemajuan bangsa Barat dalam bidang teknologi dan persenjataan dan disisi lain mulai mundurnya kekaisaran Cina yang telah berkuasa selama berabad-abad yang telah dijadikan selama ini. Dari sana lah, modernisasi Jepang berawal dan pada perkembangannya memberikan pengaruh besar bagi Indonesia sekarang ini.

Hubungan Indonesia-Jepang di tanah Hindia Belanda pada konteks itu, diawali dengan kedatangan imigran ilegal yang tidak terorganisir yang disebut dengan *kimin*¹. Kepergian para *kimin* tersebut diakui oleh Kaisar pada bulan April 1896 karena memang pada masa itu Jepang lebih konsen pada kepentingan

¹ Shiraishi dan Takashi Shiraishi, "Orang Jepang di Asia Tenggara", Yayasan Obor, Jakarta, 1998. Hal 4.

kemajuan teknologi industri dan menelantarkan rakyatnya. Dengan alasan perbaikan ekonomi yang menjadi alasan utama eksodus warga Jepang, khususnya orang-orang dari Pulau Kyushu yang gersang, ke berbagai penjuru dunia.

Para *kimin* ini sebagian besar adalah perempuan. Di Indonesia, pada tahun 1897 terdapat 125 orang Jepang yang terdiri dari 25 laki-laki dan 100 perempuan. Sementara itu, menurut survei dari Konsulat Jepang di Indonesia pada tahun 1909 terdapat 782 orang Jepang, 56% adalah perempuan (Hiroshi, 1992: 19—20). Mereka terlibat dalam aktivitas pertanian, perikanan, perdagangan, dan juga dalam *improper trades* seperti pelacuran dan usaha rumah-rumah bordil². Kehadiran pelacur-pelacur yang datang dari Jepang (*karayuki-san*) merupakan dinamika sosial tersendiri dalam hubungan Indonesia-Jepang awal.

Lahirnya Jepang sebagai kekuatan perang sejajar dengan bangsa-bangsa Barat merupakan kesuksesan yang telah dicapai oleh Jepang itu sendiri. Kalangan militer secara struktural masuk dalam birokrat pemerintahan sehingga arah kebijakan semakin cenderung militer nasionalis yang lebih mengarah ultranasionalis. Untuk tujuan ini pemerintah menggalakan politik “ekspansi ke selatan” untuk mencari wilayah penghasil minyak, sebagai sumber penting pendukung perang. Sejak paruh kedua tahun 1910-an, armada laut Jepang telah mengimpor minyak dari Tarakan Borneo (Goto, 1997: 8).

Hubungan Indonesia-Jepang pada tahun 1930-an semakin terlihat intensif terutama dalam hubungan ekonomi dan industri. Kemudian muncul para pengusaha besar Jepang yang sukses menanamkan saham di Indonesia seperti

² Pangastoeti, Sri. “Dari Kyuushuu ke Ran’in: Karayuki-San dan Prostitusi Jepang di Indonesia (1885-1920)”, *Humaniora* vol.21, Yogyakarta, 2009. Hal 139.

Mitsui, Mitsubishi, dan Sumitomo. Para pengusaha besar itu melakukan ekspansi usaha dengan mendirikan cabang-cabangnya di Indonesia. Kegiatan ekspansi pengusaha sangat didukung oleh pemerintah Jepang. Bantuan keuangan besar ditawarkan untuk para pengusaha, tercatat bahwa Bank of Taiwan dan Yokohama Specie Bank yang didirikan karena adanya perdagangan gula dengan orang Jepang (Shiraishi, 1998:12). Pada masa ini berbagai pengusaha kecil dan besar berkembang pesat di berbagai daerah di Indonesia.

Desember 1942, Jepang menggertak dunia dengan penyerangan terhadap pangkalan militer AS di Pearl Harbour. Tanpa menunggu reaksi, Jepang terus bergerak masuk kedalam wilayah kekuasaan blok AS salah satunya ke Indonesia melalui Tarakan, 11 Januari 1942 (Poesponegoro, 1984: 1) untuk menguasai ladang minyak besar. Selanjutnya dengan cepat Belanda dapat dipaksa menyerah yang sebelumnya pada saat itu Belanda menjajah Indonesia, dengan datangnya Jepang ke Indonesia kemudian Belanda meninggalkan Indonesia. Pada saat itu mulai Indonesia berada dalam pendudukan Jepang.

Awal kedatangannya, Jepang menyebarkan propaganda dengan menyebut Jepang adalah saudara tua Indonesia. Paham propaganda bermaksud untuk mengambil hati rakyat Indonesia agar mendukung Jepang dalam Perang Pasifik. Berbagai macam propaganda dalam bidang politik, ekonomi, militer, pendidikan, dan kebudayaan dilancarkan. Pada masa ini, hubungan Indonesia-Jepang masuk dalam tataran politik. Jepang menduduki Indonesia lalu mengatur sistem pemerintahan dan mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Selain itu, Jepang memberlakukan sistem kerja paksa atau romusha untuk membangun

infrastruktur. Mereka bekerja tanpa upah dan tanpa makanan yang cukup. Meskipun Jepang hanya berkuasa selama tiga tahun di Indonesia, penderitaan bangsa Indonesia pada saat itu sangat besar dan berat.

Pada tahun 1943 kekuatan Jepang di Asia Pasifik mulai terdesak oleh Amerika Serikat. Jepang memerlukan tambahan tentara untuk membantunya melawan kekuatan Amerika dan Sekutunya. Jepang yang berhasil menduduki wilayah Indonesia mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Mereka melakukan banyak hal di Indonesia untuk mencapai tujuan yang mereka hendaki. Jepang membentuk organisasi militer dan semi militer yaitu bernama Seinendan dan Keibodan. Ini adalah sebuah organisasi pemuda yang di bentuk pada tanggal 29 April 1943. Tujuan Jepang membentuk organisasi ini adalah untuk menyiapkan suatu kekuatan cadangan dalam menghadapi serangan sekutu terhadap Jepang. Jepang juga melakukan propaganda, para pemuda dalam kelompok Seinendan dan Keibodan ini dinyatakan sebagai para pemuda yang mampu mempertahankan tanah air dengan kekuatannya sendiri.

Selain adanya pasukan Seinendan dan Keibodan, Jepang juga membentuk pasukan Heiho dan PETA. Pasukan Heiho ini memberikan kesempatan untuk para pemuda Indonesia di latih militer dan membantu tentara Jepang yang langsung di pimpin oleh komando Jepang. Pasukan ini si tempatkan pada angkatan darat dan juga angkatan laut. Pasukan Heiho ini berbeda dengan pasukan PETA (Pembela Tanah Air) karena pasukan ini berfungsi menggantikan pasukan Jepang saat perang. Pangkat perwira tidak pernah di berikan pada pasukan-pasukan ini, karena pangkat perwira hanya di berikan untuk orang Jepang saja.

Jepang sangat ingin selalu menguasai Indonesia karena kekayaan sumber minyak yang di miliki oleh indonesia. Jepang ingin memeberikan kemerdekaan kepada Indonesia jika mereka sudah yakin bahwa pemimpin Indonesia bersedia menjadi penikut setia Jepang atau dengan kata lain Indonesia di jadikan sebagai “negara boneka” Jepang. Memang pada awalnya Jepang telah membarikan janji kepada Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia “pada suatu hari nanti”. Ini adalah sebuah janji yang sangat mengambang dan tidak adanya suatu kepastian yang jelas.

Kehadiran Jepang di Indonesia ini juga telah memberikan semangat kepada bangsa Indonesia untuk merdeka dan menolak kedatangan Belanda ke Indonesia lagi. Kemudian para pemimpin Indonesia menyadari bahwa kekalahan Jepang hanya tingaal menghitung hari karena telah jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 dan Uni Soviet telah menguasai bagian Selatan dan wilayah Jepang Utara.

Pada tanggal 15 Agustus 1945, melalui radio di beritakan bahwa Kaisar menyatakan menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Pihak Jepan diwajibkan menyerahkan seluruh senjatanya kepada pihak sekutu dan Jepang tidak lagi ikut campur tangan dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, kemudian setelah pembacaan nakah proklamasi bahwa Indonesia dinyatakan merdeka dan berita kemerdekaan Indonesia di

umumkan ke seluruh Indonesia dan dunia lewat alat komunikasi yang dimiliki oleh Jepang.³

Jadi hubungan yang dilakukan oleh Jepang dengan Indonesia pada periode sebelum Indonesia merdeka adalah berawal dari hubungan antar perdagangan, dan kemudian Jepang melihat bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah yang lantas hal tersebut membuat Jepang berambisi untuk menguasainya dengan didukungnya keadaan yang pada saat itu adalah sedang berlanjutnya Perang Dunia ke-2 yang sangat membutuhkan sekali bahan-bahan untuk perang.

2. Periode Setelah Indonesia Merdeka

Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II dan kemerdekaan Indonesia merupakan masa renggangnya hubungan antardua negara tersebut. Ambisi ekspansi Jepang terhenti dan sibuk dengan masa perbaikan setelah kehancuran negara besar-besaran akibat perang. Arah kebijakan beralih menjadi nonmiliter (fokus pada rehabilitasi) sebagai usaha membangun kembali negara. Hubungan Indonesia-Jepang kembali dijalin ketika Jepang diikutsertakan AS dalam Konferensi San Fransisco tahun 1951. Pertemuan yang membahas masalah pampasan perang Jepang terhadap negara-negara pada masa Perang Pasifik, tak terkecuali ganti rugi perang terhadap Indonesia. Walaupun dalam proses pelobian yang bersebrangan ini, hubungan Indonesia-Jepang terjalin dengan intens.

³ Jannah Lia, "Hubungan diplomatik Indonesia-Jepang Pasca Perang Pasifik (1941-1945)", dimuat dalam <http://diplomacy945.blogspot.co.id/2010/06/hubungan-diplomatik-indonesia-jepang.html>, diakses pada 01 Juni 2010.

Fakta perdamaian dan perjanjian pampasan antara Jepang dan Indonesia ditandatangani pada 20 Januari 1958 dan hubungan diplomatik secara resmi dimulai pada 15 April (Nishihara, 1994: 52). Perundingan ini merupakan perundingan terlama Jepang mengenai masalah pampasan perang hal ini terkait dengan banyaknya konstelasi dan tarik ulur politik di negara Indonesia sendiri karena sangat membutuhkan pasokan bantuan. Pada Desember 1957, disusun Memorandum Kobayashi-Djuanda yang isinya bahwa rampasan Jepang akan berjumlah \$230 juta selama 12 tahun. Di tahun 1958 memorandum tersebut akhirnya disetujui oleh pemerintahan Jepang dan akhirnya diratifikasi ditukar di Tokyo pada 15 April 1958. Pada hari itu, Jepang dan Indonesia secara resmi melakukan hubungan diplomatik. Diperkirakan ada sekitar 200 pertukaran nota antar kedua negara yang mengatur hubungan kerjasama dalam bidang pertanian, kehutanan, peningkatan produksi pangan dan bantuan keuangan.

a. Hubungan Indonesia-Jepang Pada Masa Orde Lama – Orde Baru

Berkumandangnya proklamasi kemerdekaan di tanah air Indonesia pada 17 Agustus 1945 ternyata bukan merupakan akhir dari hubungan Indonesia dan Jepang. Paska pendudukannya di Indonesia, Jepang masih tetap melancarkan kegiatan kerjasama dengan Indonesia

Sejak masa orde lama hingga orde baru, Jepang dan Indonesia mulai menjajaki hubungan kerja sama dan diplomasi yang diharapkan lebih baik dan dinamis. Pada masa pemerintahan presiden Soekarno, fokus pemerintahan serta politik luar negeri saat itu adalah untuk mencari pengakuan negara lain mengenai kemerdekaan negara Indonesia, serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia

dan juga menjunjung tinggi sikap anti kolonialis dan juga anti imperialis serta menutup politik luar negeri dari negara-negara barat. Politik luar negeri era Soekarno juga dikenal dengan politik konfrontasinya seperti contohnya adalah konfrontasi mengenai ganyang Malaysia.⁴

Kepemimpinan Soekarno memperlihatkan sifat – sifat militan dan cenderung konfrontatif terhadap segala unsur yang diidentifikasi sebagai ”antek imperialisme”. Dalam hal ekonomi, Soekarno mengatur segala rencana pembangunan ekonomi dan memiliki semboyan ”berdiri di atas kaki sendiri” yang merefleksikan pendirian anti-Barat. Karena inilah, secara umum hubungan Indonesia dengan negara – negara Barat bisa dikatakan tidak harmonis. Sebaliknya, sifat politik luar negeri Indonesia yang konfrontatif tersebut berganti dengan politik yang bersifat kooperatif.

Berbeda pada era Soekarno, presiden Soeharto berfokus pada pembangunan ekonomi yang sempat mengalami keterpurukan pada masa Soekarno serta membuka selebar-lebarnya investasi asing yang akan masuk ke Indonesia dengan harapan bahwa hal tersebut dapat menstabilkan kondisi ekonomi Indonesia dan juga menyokong perdagangan bebas. Hal ini membuat Jepang menanamkan investasinya secara besar besaran dan tidak ragu untuk memberi berbagai macam bantuan kepada Indonesia. Pemerintah Orde Baru membuka diri pada keberadaan modal asing, hal ini ditandai dengan

⁴ Bando, B, “Beberapa Dimensi Hubungan Indonesia-Jepang dan Pelaporan untuk Indonesia”, dimuat dalam B. Bando, ed. Hubungan Luar Negeri Indonesia selama Orde Baru, CSIS, Jakarta, 1994. Hal. 93-124.

diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) pada tanggal 1 Januari 1967.

Soeharto memiliki konsep pembangunan di dalam pemerintahannya, Hubungan Pemerintah Orde Baru dengan negara-negara Barat dimanfaatkan untuk mencari pasokan modal tersebut, salah satunya Jepang yang merupakan sekutu AS. Langkah awal pemerintahan Orde Baru dalam mendapatkan modal asing, salah satunya dengan bergabung kembali sebagai anggota PBB. PBB memberikan bantuan kepada pemerintahan Orde Baru dengan membentuk forum negara-negara pembantu modal yang disebut dengan IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia) pada 20 Februari 1967. IGGI merupakan forum Internasional yang menjadi perantara koordinasi antara Indonesia dan bank – bank Internasional dalam hal ide – ide pembangunan dan program bantuan keuangan.

Kebijakan pemerintahan Orde Baru untuk mengundang kembali modal asing didasarkan kenyataan bahwa adanya keinginan untuk membangun kembali perekonomian hanya mungkin dengan adanya modal yaitu modal barang dan teknologi yang diperlukan. Hal ini dirasa mendesak pada masa akhir pemerintahan Orde Lama. Pada masa itu, kondisi di dalam negeri diwarnai oleh inflasi yang tinggi. Pengangguran yang meningkat, hutang yang bertambah besar dan ketidakmampuan membangun industri. Kondisi demikian yang mendorong pemerintahan Soeharto untuk mengundang kembali modal asing dalam berbagai sektor perekonomian dengan mengutamakan pemilik modal dari negara-negara Barat dan juga Jepang.

Mengenai penanaman modal Jepang, dalam forum IGGI pada Mei 1973, Jepang berkomitmen mengucurkan pinjaman sebesar US\$ 180 Juta. Nilai ini lebih besar dari pinjaman modal Amerika yang hanya US\$ 150 juta.¹ Ketertarikan Jepang menanamkan modal di Indonesia tidak lain karena melimpahnya bahan mentah dan tenaga kerja buruh yang murah, sehingga membuat Jepang berani mengucurkan modal lebih banyak dari Amerika⁵. Memasuki semester kedua 1973, total investasi Jepang di Indonesia mencapai US\$ 467,7 juta untuk 119 proyek. Peningkatan yang sangat signifikan, ini membuktikan bahwa ada ketertarikan Jepang yang kuat terhadap Indonesia dengan total investasi Jepang pada tahun 1973 mencapai 147 proyek dengan nilai US\$611,5⁶. Masuknya modal Jepang ke Indonesia menimbulkan polemik di dalam negeri. Puncaknya, pada tanggal 15 Januari 1974 terjadi peristiwa malapetaka 15 Januari atau yang sering disebut Malari yang mencoreng pemerintahan Soeharto. Peristiwa ini terjadi ketika sekumpulan mahasiswa bersiap-siap menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka yang berkunjung ke Jakarta, dengan berdemonstrasi besar-besaran menolak kedatangannya⁷. Unjuk rasa mahasiswa awalnya dilakukan sebagai rasa protes terhadap aliran modal asing yang semakin besar masuk ke Indonesia. Jepang dianggap memeras ekonomi Indonesia dan membuat industri Indonesia mati.

⁵ “Kompak Menampik Saudara Tua (Jepang)”, Tempo, Edisi 19 Januari 2014.

⁶ Tahiro, “Sepak Terjang Jepang di Indonesia”, Studio Kreativa, Jakarta, 2003. Hal. 153.

⁷ Kuno Yasunari dan Kobayashi Mamoru, “Indonesia no Kaisha-hou Kaikei Zeimu Roumu”, *Shuppan bunka-sha*, 2011, hal. 8.

b. Hubungan Indonesia-Jepang di Era Reformasi

Runtuhnya Soeharto dari kursi kepemimpinannya menandakan bahwa era orde baru sudah berakhir dan terjadi reformasi dalam pemerintahan. Rezim yang otoriter ala Soeharto berubah menjadi sistem pemerintahan yang demokratis yang dijalankan oleh presiden-presiden sesudah Soeharto yaitu BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo.

Pergantian kepemimpinan tentunya ikut mengatur dan kemudian membentuk sebuah kebijakan dan kerjasama luar negeri antarnegara yang berbeda dari sebelumnya. Kerjasama Indonesia dengan Jepang, kedua negara ini kian menunjukkan hubungan yang akrab dari waktu ke waktu. Selain pada pergantian masa kepemimpinan presiden Indonesia seperti Ir. Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudian Joko Widodo, perubahan corak politik luar negeri Indonesia juga dipengaruhi oleh isu-isu yang berkembang dan juga dialami oleh negara Indonesia.

Hubungan Indonesia-Jepang menjadi semakin baik memasuki dasawarsa 1980an. Persoalan investasi, perdagangan, alih teknologi, dan bantuan keuangan ke Indonesia menjadi beberapa contoh isu yang populer dalam dasawarsa ini (Bandoro, 1994). Persoalan ekonomi masih menjadi isu utama, walaupun isu keamanan juga mulai menjadi perhatian bersama. Jepang merupakan investor asing terbanyak pada dasawarsa ini. Tercatat 24,8% dari investasi asing yang ada di Indonesia adalah investasi Jepang (Schwarz dan Vasikiotis, 1991 dalam Bahri,

2004). Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi penting di mata Jepang. Terlebih, neraca perdagangan Jepang-Indonesia menunjukkan defisit bagi Jepang. Pada 1989, ekspor Jepang ke Indonesia hanya 3,3 milyar dolar AS. Jumlah itu tentunya lebih sedikit dibanding impor Jepang dari Indonesia yang mencapai 11 milyar dolar AS (Schwarz dan Vasikiotis, dalam Bahri, 2004). Meski defisit, Jepang tetap membutuhkan dan mengimpor bahan mentah dari Indonesia untuk menjalankan produksinya⁸ (Bahri, 2004). Karena itu, Jepang mulai memikirkan mengenai keamanan regional. Hal ini dilakukan tidak lain untuk melindungi investasi Jepang di Indonesia. Meski demikian, baik Indonesia maupun Jepang terkadang masih memiliki perbedaan persepsi mengenai isu keamanan ini⁹.

Bantuan pendanaan kegiatan pembangunan yang diberikan Jepang selama ini telah menempatkannya sebagai negara penyumbang terbesar bagi Indonesia. Salah satu bentuk bantuan tersebut adalah *Official Development Assistance* (ODA). Sejak tahun 1987, Indonesia termasuk negara terbesar yang menyerap ODA Jepang. Analisa terhadap sejarah keberadaan ODA menjadi bahasan yang menarik, dengan adanya fakta bahwa secara kuantitatif menunjukkan nilai ODA meningkat namun secara kualitatif tidak demikian. Selain itu dengan besaran nilai ekspor kekayaan laut Indonesia ke Jepang, perlu dicermati dengan kemungkinan munculnya dampak negatif dan krisis kelangkaan kekayaan laut sebagai akibat pemanfaatan yang tidak bijak.

⁸ Bahri, M.M., “*International Aid for Development? An Overview Japanese ODA to Indonesia*”, Makara, Sosial Humaniora, 2004, hal. 39-44.

⁹ ibid

Sebagai negara maju dengan pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang cepat, Jepang dapat menjadi wacana dalam pengelolaan ekonomi nasional Indonesia. Analisa tentang sistem penyusunan anggaran belanja negara di Jepang menunjukkan adanya keunikan karena tidak mengikuti standar internasional. Terlepas dari adanya kelemahan sistem ini, banyak kelebihan yang bisa dipelajari dan dipikirkan kemungkinan pengembangannya di Indonesia.

Selain ODA, Jepang juga menawarkan proposal pembentukan *Free Trade Agreement* (FTA) pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Tawaran pembentukan FTA dari Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi tersebut membuahkan tindak lanjut kerjasama *Indonesia Japan economic Partnership Agreement* (IJEPA). Kerjasama IJEPA ini rupanya sangat didukung oleh kerjasama Jepang dengan ASEAN karena dengan merangkul ASEAN, Jepang memiliki jalur masuk perdagangan ke negara-negara Asia Tenggara yang lebih mudah dan menguntungkan. Selain itu, liberalisasi pasar di Indonesia membuat produk-produk Jepang menjadi lebih mudah masuk ke Indonesia.

Setelah Presiden Megawati Soekarno Putri meninggalkan kursi kepresidenannya, tindak lanjut *economy partnership* diteruskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2004, menteri perdagangan Indonesia dan Jepang menyepakati Joint Study Group sebagai upaya awal peninjauan kegiatan ekonomi partnership. Akhirnya negosiasi akhir mengenai IJEPA pada tahun 2007 ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Abe Shinzo.

Penandatanganan *Japan-Indonesia Partnership Agreement* (JIEPA) pada bulan Agustus 2007, menandai era baru yang memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Tidak saja dalam tercapainya kesepakatan pengaturan mobilisasi tenaga kerja kedua negara, tetapi cakupan kerjasama meluas dengan perjanjian ini. Termasuk di dalamnya kerjasama dalam bidang teknologi. Kupasan tentang transfer teknologi dari Jepang kepada Indonesia dikaitkan dengan budaya, tradisi dan nilai-nilai sosial yang dimiliki kedua negara disajikan secara ringan.¹⁰

Tahun 2008 merupakan tahun persahabatan Indonesia-Jepang. Hal ini dikarenakan tahun 2008 merupakan peringatan 50 tahun hubungan Indonesia-Jepang. Peringatan 50 tahun ini diawali dengan kunjungan Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono ke Jepang pada November 2007. Pada kesempatan itu, Presiden SBY dan Perdana Menteri Abe Shinzo menandatangani pernyataan bersama RI-Jepang, yakni Kemitraan Strategis Menuju Masa Depan yang Damai dan Sejahtera (Embassy of Japan in Indonesia, 2007). Dalam pernyataan tersebut, disebutkan bahwa tahun 2008 merupakan kesempatan yang baik untuk memperkuat hubungan Indonesia-Jepang yang sudah berjalan selama 50 tahun. Pernyataan tersebut juga membahas mengenai bagaimana hubungan tersebut berlangsung dalam 50 tahun selanjutnya. Pengokohan hubungan 50 tahun selanjutnya tersebut diawali dan dilakukan pada tahun persahabatan Indonesia-Jepang. Pada tahun 2008, diadakan berbagai kegiatan di bidang-bidang seperti: pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk

¹⁰ Amari, A. "Pentingnya JIEPA", Dimuat dalam <http://nasional.kompas.com/read/2008/06/30/01251714.pentingnya.jiepa>, Kompas, [Online] 30 Juni, diakses pada 3 Desember 2014.

memperluas pertukaran antara rakyat kedua negara dan memperdalam pengertian antar generasi¹¹.

Hubungan ekonomi Indonesia-Jepang semakin menguat yang ditandai dengan meningkatnya volume perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia–Jepang selama bulan Januari sampai dengan Agustus 2011 adalah sebesar USD 35,1 milyar, meningkat sebesar 29% dari periode yang samatahun 2010. Total nilai perdagangan Indonesia-Jepang tahun 2010 dan 2009 masing-masing sebesar USD 42,7 milyar dan USD 28,4 milyar. Bagi Jepang, Indonesia masih merupakan sumber utama pasokan energi, yakni gas dan batu bara untuk industri serta sumber daya alam lainnya seperti timah dan nikel.

Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam sektor ekonomi terus berkembang. Pada akhir tahun 2013, di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia dan Jepang semakin mempererat hubungan dengan menyepakati kerjasama dalam bidang perdagangan, penanaman modal, pembangunan infrastruktur agar dapat tumbuh bersama berdasarkan kesepakatan pada tingkat menteri untuk lebih mendorong kerja sama Metropolitan Priority Area (MPA) di wilayah Jabodetabek. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut baik tren positif perdagangan bilateral dengan Jepang, yang mencatat pertumbuhan rata-rata lebih dari 11% dalam lima tahun terakhir (2008-2013). Adapun total nilai perdagangan Januari-Agustus 2013 telah mencapai US\$ 31,24 miliar.

¹¹ Embassy of Japan in Indonesia, “Apakah Tahun Persahabatan Indonesia-Jepang 2008”, dimuat dalam http://www.id.emb-japan.go.jp/ijff_apa_id.html, diakses pada 3 Desember 2014.

Berakhirnya masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono digantikan oleh Presiden Joko Widodo yang pada Maret 2015 melakukan kunjungan ke Jepang dan Tiongkok guna mempererat hubungan kerjasama dalam sektor ekonomi. Di Jepang Presiden Joko Widodo menghadiri forum bisnis bersama dengan 1000 pengusaha Jepang. Di sana, Jepang memandang Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan perekonomian yang mantap serta memiliki masyarakat kelas menengah yang terus tumbuh sehingga meningkatkan keinginan Jepang menanamkan modalnya di Indonesia. Indonesia juga dianggap sebagai sosok pemimpin ASEAN yang memegang peranan besar dalam stabilitas wilayah dan keakmuran dengan populasi dan GDP Indonesia yang mencapai 40 % dari populasi dan GDP ASEAN. Dalam kunjungan itu, Indonesia menekankan posisi Jepang sebagai mitra strategis sehingga Indonesia siap membuka peluang kerjasama yang lebih luas dan progresif.

B. BENTUK-BENTUK KERJASAMA INDONESIA DENGAN JEPANG

Jepang merupakan salah satu negara yang dikategorikan sebagai negara *superpower* dunia. Dengan tingginya tingkat ekonomi yang dimiliki, potensi militer yang sangat kuat serta aliansi yang diboncengi oleh Amerika Serikat membuat posisinya semakin kuat. Posisi strategis Jepang tersebut selanjutnya mendorong Indonesia sebagai salah satu mitra penting dalam konteks diplomasi dan kerjasama bilateralnya, berikut bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan Jepang :

1. Hubungan Politik Indonesia dengan Jepang

Hubungan politik luar negeri Indonesia dengan Asia Timur menjadi topik pembahasan kali ini. Namun dalam paper ini lebih difokuskan pada hubungan politik luar negeri Indonesia dengan negara Jepang. Dinamika hubungan kedua negara tersebut tentunya juga mengalami pasang surut dalam perjalanannya yang sudah cukup lama. Keduanya sama-sama berpandangan bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain. Persahabatan dengan berlandaskan saling pengertian dan simbiosis mutualisme telah merekatkan hubungan kedua negara. Hubungan keduanya lebih banyak di bidang ekonomi dibanding bidang lainnya. Pada dasawarsa 1960-an, di Indonesia berkembang dua sekte pemikiran mengenai Jepang. Hubungan Indonesia-Jepang yang dimulai sejak tahun 1958 telah memosisikan Indonesia sebagai mitra strategis Jepang dalam menunjang berbagai aspek perekonomiannya serta negara Jepang juga dapat menjadi panutan bagi Indonesia, terkait perannya di berbagai bidang. Indonesia merupakan tujuan investasi dan sumber bahan baku bagi industri Jepang. (www.bppt.go.id)

Pada awalnya hubungan diplomatik yang terjalin antara Indonesia dengan Jepang tidak dinilai sebagai suatu ancaman. Namun pada pertengahan tahun 1960-an, setelah beberapa elit politik luar negeri Indonesia kembali dari kunjungan mereka ke Jepang, mereka tidak hanya terkesan tetapi juga khawatir akan kekuatan Jepang yang dapat mendorongnya untuk melakukan ekspansionisme. Awal 1970-an, Jepang dinilai sebagai sumber ancaman bagi Indonesia. Dinilai sebagai ancaman, karena Jepang mempunyai potensi teknologi dan kekuatan militer yang besar, dikhawatirkan hal ini akan mengancam stabilitas

kawasan Asia Tenggara. Kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Jepang dalam periode ini lebih difokuskan pada pencapaian tujuan ekonomi demi perbaikan pembangunan Indonesia, karena Jepang merupakan sumber pembangunan dan “donor” luar negeri yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalangan generasi muda saat itu menaruh curiga terhadap Jepang berdasarkan penilaian pragmatis atas situasi hubungan Indonesia-Jepang, bukan berdasar pada okupasi Jepang dalam era perang maupun atas konsepsi bahwa Jepang adalah negara yang agresif¹². Kemudian pada 1980-an, hubungan diplomatik Indonesia dengan Jepang pada mulai berkembang ditandai dengan adanya pertemuan- pertemuan dan ditandatanganinya perjanjian- perjanjian kerjasama terutama dalam aspek ekonomi.

Sebagai negara maju dengan perindustrian yang berkembang, Jepang tentunya membutuhkan persediaan *raw materials* sebagai bahan dasar dalam proses produksinya. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah dan tentunya hal tersebut dipertimbangkan oleh Jepang dalam menjalin hubungan dengan Indonesia. Perdagangan antara Indonesia dan Jepang merupakan contoh dimana dua ekonomi nasional dapat saling Mendukung dan melengkapi. Indonesia merupakan sumber bahan mentah untuk industri Jepang, sementara produk- produk Jepang dapat dipasarkan di Indonesia. Meskipun sempat diwarnai kritik karena pandangan bahwa perdagangan kedua negara asimetris dengan Jepang sebagai pihak yang banyak diuntungkan, namun hubungan kedua negara

¹² Bandoro, Bantarto, 1994. "Beberapa Dimensi Hubungan Indonesia-Jepang dan Pelaporan untuk Indonesia", dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 93-124.

masih berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya berbagai macam pertemuan, simposium, maupun kunjungan timbal-balik kedua negara. Hubungan kedua negara pun semakin matang dan menyentuh ranah-ranah lain di luar ekonomi. Jepang merupakan salah satu pasar tujuan ekspor Indonesia dengan nilai yang signifikan. Saat ini lebih dari 1.200 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia dan menyediakan lebih dari 300.000 lapangan pekerjaan. Lebih dari 14.000 orang warga negara Jepang tinggal di Indonesia. Posisi Jepang bagi Indonesia cukup penting. Selain itu Indonesia merupakan tempat strategis termasuk kelautannya yang merupakan tempat transit kapal-kapal dari Singapura yang akan ke Jepang. Indonesia juga menjadi Pasar yang menjanjikan bagi Jepang. Sementara Jepang sendiri merupakan Negara dengan peringkat pertama sebagai investor di Indonesia, Jepang juga telah memberikan banyak bantuan ekonomi dan pendidikan seperti pada kasus Tsunami Aceh.

Hubungan diplomatik dalam kerangka politik Indonesia- Jepang lebih banyak dilakukan dalam dalam lingkup ASEAN. Selain itu hubungan dalam bidang itu dikaitkan dengan usaha Indonesia untuk mengembangkan adaptasi independen terhadap tantangan- tantangan yang sama yang muncul dalam lingkungan mereka (Bandoro, Bantarto. 1994). Bila merefleksi hubungan diplomatik keduanya hingga saat ini, hubungan yang telah terjalin selama lima puluh tahun ini bersifat begitu kompleks. Dengan penandatanganan serangkaian perjanjian antara kedua negara, hubungan diplomasi yang ada bersifat multitrack, tidak hanya meliputi antar pemerintah, melainkan juga termasuk perusahaan, *non-governmental organization*, hingga masyarakat sipil.

2. Kerjasama Ekonomi Indonesia dengan Jepang

Indonesia merupakan mitra penting Jepang dalam hal kerjasama di bidang perdagangan. Selain itu, Indonesia sendiri merupakan negara menarik bagi Jepang untuk melakukan investasi, hal ini karena pertumbuhan pasar di Indonesia cukup besar. Jepang juga merupakan negara destinasi ekspor Indonesia seperti terlihat dari beberapa produk-produk Indonesia yang diekspor ke Jepang seperti bahan bakar mineral (minyak dan gas), bijih besi, kayu dan nikel. Tak hanya itu, dalam bidang infrastruktur Jepang dan Indonesia juga memiliki hubungan kemitraan yang telah terjalin baik.

Kunjungan Presiden R.I, Susilo Bambang Yudhoyono ke Jepang pada tahun 2005 menghasilkan dua dokumen penting di bidang kerjasama ekonomi kedua negara. Delegasi R.I dan tuan rumah, akan menandatangani *Strategic Investment Action Plan (SIAP)*. Dokumen SIAP merupakan sebuah dokumen yang berisi hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia dan juga bagaimana mempercepat lebih banyak penanaman investasi Jepang di Indonesia. Di dalamnya menyangkut perbaikan sektor pajak dan bea cukai perburuhan infrastruktur, dan daya saing internasional.¹³

Investasi langsung swasta dari Jepang ke Indonesia yang menurun sehubungan dengan stagnasi yang dialami perekonomian Indonesia akibat krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997 belum pulih sepenuhnya namun

¹³ Kemendag, "Kerjasama Indonesia-Jepang : Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership (IJ-EPA)", dimuat dalam <http://www.kemendag.go.id/id/perdagangan-kita/agreements>.

Jepang menempati kedudukan penting diantara Negara-negara yang berinvestasi di Indonesia. Dalam jumlah investasi langsung asing di Indonesia dari tahun 1967 hingga tahun 2007, Jepang menduduki tempat pertama dengan angka 13% dalam keseluruhannya. *Strategic Investment Action Plan (SIAP)* meliputi bidang pajak atau bea cukai, tenaga kerja, infrastruktur, dan bidang persaingan usaha kecil dan menengah.

Dokumen lainnya adalah Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA) yang merupakan upaya awal menuju perdagangan bebas di antara kedua negara. IJEPA merupakan kerjasama era baru di bidang ekonomi antara Jepang-Indonesia dalam *capacity building* dan melakukan liberalisasi, promosi dan fasilitas dari perdagangan dan investasi antar dua negara.¹⁴

Tidak seperti perjanjian perdagangan bebas sebelumnya, EPA merupakan kerjasama perdagangan yang mencakup tidak hanya liberalisasi namun juga sektor lainnya yaitu, Jasa, Investasi, Energi, dan sebagainya yang tercakup dalam Tiga Pilar Utama yaitu :

2.1. Fasilitas Perdagangan dan Investasi meliputi :

Upaya bersama untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan tingkat kepercayaan bagi investor Jepang dan kerjasama di bidang prosedur Kepabeanan, pelabuhan dan Jasa jasa perdagangan.

2.2. Liberalisasi meliputi :

¹⁴Bappenas, “Meningkatkan Kemitraan Indonesia-Jepang untuk Pembangunan”, dimuat dalam <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/meningkatkan-kemitraan-indonesia-jepang-untuk-pembangunan/> diakses pada 28 Agustus 2016.

Menghapuskan atau mengurangi hambatan perdagangan dan investasi (Bea Masuk, memberi kepastian hukum)

2.3. Kerjasama meliputi :

Kesepakatan untuk kerjasama dalam meningkatkan kapasitas Indonesia, sehingga lebih mampu bersaing dan memanfaatkan secara optimal peluang pasar dari EPA.

Dengan adanya perjanjian kerjasama EPA, Indonesia akan memperoleh beberapa keuntungan dan manfaat antara lain, Kemitraan dalam EPA menggambarkan kepentingan dari kedua negara yang mengikatkan diri. Serta manfaat dari EPA meliputi : EPA dapat meningkatkan investasi dari Jepang dan EPA akan meningkatkan kapasitas daya saing Indonesia secara umum maupun di sektor-sektor tertentu, antara lain : Peningkatan kapasitas, khususnya di area standarisasi produk dan pengujian kebersihan dan standard kesehatan untuk produk makanan dan minuman, pelatihan keterampilan dan teknologi di sektor manufaktur yang akan meningkatkan mutu produk Indonesia di pasar domestik dan internasional serta program-program peningkatan kapasitas di bidang energi, industri, pertanian, promosi ekspor dan investasi.

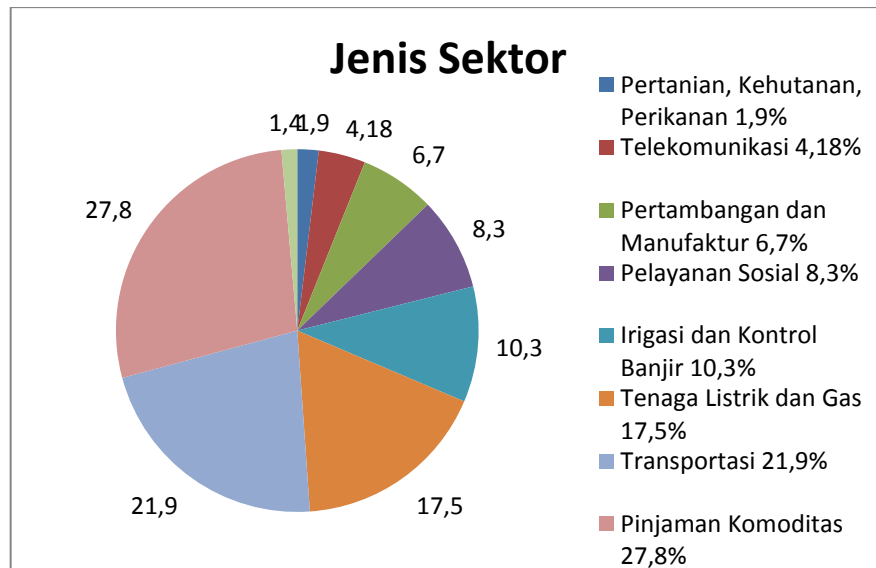
Selain itu membahas tentang bantuan ODA (Official Development Assistance) yang ditujukan untuk memberikan bantuan dana dan teknik yang dibutuhkan untuk pembangunan sosial ekonomi di Indonesia. Jepang mengklaim bahwa Indonesia merupakan negara yang mendapatkan ODA (Official Development Assistance) yang terbesar dari Jepang (berdasarkan realisasi netto

pembayaran pada tahun 2005 adalah US\$ 1,22 milyar, yaitu kurang lebih 17% dari seluruh ODA yang diberikan Jepang).

Kebijaksanaan pemerintah Jepang mengenai bantuan berupa pinjaman proyek bertujuan untuk menyempurnakan prasarana industri serta kerjasama teknik untuk mengembangkan sumber daya manusia. Bantuannya bersifat luwes sesuai dengan perkembangan kebijaksanaan ekonomi Indonesia dan sekaligus juga melalui kerjasama untuk peningkatan kebutuhan dasar pokok manusia. Bantuan seperti ini melalui kerjasama teknik dan bantuan hibah yang tidak perlu dibayar kembali. Umumnya bantuan Jepang adalah sebagai bantuan (*grants*) dan pinjaman (*loans*). Bantuan Jepang dimanajeri oleh JICA (*Japan International Cooperation Agency*), dan pinjaman diatur oleh badan lain yaitu OECF (*Overseas Economic Cooperation Fund*). Secara relatif bantuan keuangan Jepang pada Indonesia lebih nyaman bagi Indonesia dalam arti tidak terlalu mengaitkan dengan syarat- syarat politik. Berdasarkan laporan JBIC, bantuan ODA hingga tahun 2000 mencapai lebih dari 600 buah. Selama kurang lebih 30 tahun, ODA Jepang memberikan kontribusi ke berbagai bidang pembangunan. Berikut perbandingan bantuan ODA terhadap sektor sosial ekonomi: ¹⁵

¹⁵ Kedutan Besar Jepang di Indonesia, “Hubungan Perekonomian Indonesia-Jepang”, dimuat dalam (http://www.id.emb-japan.go.jp/birelEco_id.html), diakses pada 2 Juni 2008.

Gambar 2.1 Distribusi ODA Terhadap Sektor Sosial Ekonomi Indonesia



Sumber : Kedutaan Besar Jepang di Indonesia

Terdapatnya pengakuan dari pihak Jepang bahwa investasi Jepang di kawasan Asia Tenggara, utamanya Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Indonesia dipandang menjadi pendorong utama bagi peningkatan investasi di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan survey peringkat tujuan investasi yang diadakan JBIC, Indonesia menempati peringkat ke 8 (delapan) pada tahun 2007 naik satu peringkat ke peringkat ke 7 (tujuh) pada tahun 2006. Menarik untuk diperhatikan bahwa investasi dilakukan oleh perusahaan Jepang berada pada sektor usaha kecil dan menengah. Di samping itu, investasi yang masuk belakangan ini bukan merupakan investasi baru, melainkan ekspansi perusahaan-perusahaan Jepang yang sudah beroperasi sebelumnya. Beberapa kendala yang menjadi perhatian kalangan dunia usaha Jepang dalam melakukan investasi di Indonesia adalah iklim investasi yang belum kondusif, masalah

keamanan, perburuhan, kepastian hukum dan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah.

Selain besarnya pasar Indonesia, Indonesia juga mempunyai daya tarik lain untuk tujuan investasi Jepang, antara lain: ketersediaan tenaga kerja yang banyak, rajin dan cepat dalam penguasaan teknologi; serta Indonesia dianggap negara yang paling ramah terhadap Jepang dibanding dengan negara lain di Asia.

3. Kerjasama dalam Bidang Sosial Budaya dan Pariwisata

Setelah memutuskan untuk menekan jalur kekuatan militer dalam upaya berhubungan antar bangsa, Jepang menggalakkan soft diplomacy-nya. Salah satu dari soft diplomacy itu adalah melalui sektor kebudayaan dan hiburan. Diplomasi budaya digunakan untuk memperkuat hubungan antar negara, agar negara yang dituju lebih mengenal negaranya dalam hal ide, nilai – nilai, tradisi dan berbagai macam aspek budaya, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendapatkan kepentingan nasional.

Hubungan sosial budaya antara Indonesia dan Jepang telah terjalin dengan baik sejak lama. Untuk memwadahi jalinan hubungan kerjasama yang lebih baik, telah dibentuk beberapa lembaga persahabatan Jepang dan Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut antara lain adalah: Japan–Indonesia Association (Japinda), Organization Council Japan-Indonesia Friendship (Nihon-Indonesia Yukodantai Kyogikai), Tokyo Lagu-Lagu kai, Tanah Air kai, Merah Putih kai, Yayasan Gesang, Teman Sejati kai, Hokaido-Indonesia kai, Hiroshima-Indonesia kai, Kyoto-Indonesia Yuko Kyokai, Kansai-Indonesia Yuko Kyokai, Okinawa-Indonesia Yuko Kyokai, Nagasaki-Indonesia Yuko Kyokai, Kyushu-

Indonesia Yuko Kyokai, dan Garuda Kumamoto kai. Sementara itu, di Indonesia juga terdapat banyak lembaga persahabatan antara lain; Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang (PPIJ), dan Perhimpunan Alumni dari Jepang (PERSADA).

Semenjak akhir tahun 1990-an berlanjut hingga tahun 2000-an ini, jalur peredaran anime di Indonesia lebih banyak melalui rental atau toko anime dalam format VCD/DVD. Pada periode 2000 ini, kepopuleran anime sudah begitu sangat luar biasa sampai kepada kondisi yang sulit dibayangkan oleh para otaku (penikmat anime) sebelumnya. Trend anime ini juga didukung dengan munculnya distributor resmi yang berusaha memenuhi kebutuhan otaku akan masuknya lebih banyak anime di Indonesia.

Kemudian pada tahun-tahun terakhir ini anime mulai kembali menjadi booming lagi di Indonesia. Seperti yang dapat terlihat dari kepopuleran anime Naruto yang menghebohkan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya porsi tayang untuk anime yang mulai mendominasi program film animasi di berbagai stasiun televisi.

Perlu disadari dalam era globalisasi sekarang ini, penyebaran informasi serta hubungan ekonomi hampir tidak lagi mengenal batas. Anime menjadi bagian dari pop culture di seluruh dunia, dan Jepang sendiripun sangat gencar mempromosikan anime. Kepopuleran anime dan manga Jepang di Indonesia dapat disaksikan siapapun. Sebagai akibatnya, budaya Jepang pun menjadi sebuah tren di Indonesia. Disana-sini dapat ditemukan bentuk-bentuk asimilasi budaya Jepang.

Bagi Jepang anime merupakan salah satu media diplomasi yang sangat efektif dengan menawarkan cerita mengenai Jepang melalui visualisasi apik dan menggambarkan cerita mengenai Jepang mulai dari sejarah, budaya, gaya hidup, karakter masyarakat, serta kondisi sosial. Jadi secara tidak langsung masyarakat Indonesia mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, telah tersuguhi berbagai gambaran tentang Jepang, yang tercitra memiliki akar budaya yang begitu adi luhung, dan memasuki masa modernpun tidak lupa atau meninggalkan budaya nenek moyang yang selalu jadi kebanggaan bangsa Jepang.

Dengan kehadiran anime di Indonesia semakin mempertegas jati diri bangsa Jepang sebagai bangsa yang besar kepada masyarakat dan menjadikan anime sebagai sub-kultur yang semakin dikenal luas dan diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya remaja. Hingga Hal ini membuat Jepang hampir dapat disejajarkan dengan Amerika Serikat dan film Hollywoodnya dalam segi popularitas dan pengaruh budaya pop-nya di Indonesia.

Sebagaimana yang dikatakan Hans J. Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations* :”When we speak of power, we mean man's control over the minds and actions of other men”. Berdasarkan apa yang dikatakan Morgenthau dalam bukunya tersebut, yaitu siapapun yang memiliki Power atau kekuasaan, Maka dia akan dapat mengatur bahkan mendikte siapapun yang diinginkannya. Begitu juga hal yang dilakukan Jepang, terhadap unit politik diluar negaranya, melalui powernya Jepang terutama dari segi Ekonomi, yang terkenal dengan *Diplomacy by ATM*-nya, telah menancapkan pengaruhnya terhadap negara lain, terutama negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

Setelah sukses menanamkan pengaruhnya dalam sektor ekonomi, tentu saja hubungan ini memberikan pengaruh pada sektor lain, misalnya politik. Negara-negara yang sudah bergantung secara ekonomi tidak sulit untuk ditanamkan pengaruh politik.

Selain dalam dunia hiburan, Jepang dan Indonesia pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri menandatangani perjanjian kerjasama pariwisata. Perjanjian ini dibuat untuk mendukung peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung baik ke Indonesia maupun Jepang. Yang perlu dilakukan demi mencapai tujuan tersebut antara lain, melalui kampanye terukur, pertukaran misi untuk mempromosikan pariwisata dan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam bidang kepariwisataan itu juga melibatkan organisasi yang bergerak dalam sektor kepariwisataan untuk mengurangi halangan dan kesulitan dalam kepariwisataan. Untuk mendukung kerjasama Pariwisata, biro perjalanan *Jepang Japan Association of Travel Agent* (JATA) telah mengirimkan misinya sebanyak dua kali ke Bali mengingat pernah terjadi pemboman pada tahun 2002 untuk memastikan keamanan dan keselamatan para wisatawan.¹⁶

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa budaya pop dan pariwisata merupakan hal sayang cukup diperhatikan oleh kedua negara, sebab dengan kelancaran kerjasama dalam sektor kepariwisataan maupun industri budaya pop,

¹⁶ Andy Christine Yuliani, "Studi tentang animasi jepang (anime) dan perkembangannya di Indonesia", dimuat dalam <http://digilib.petra.ac.id/jiunkpe/s1/jdkv/2003/jiunkpe-ns-s1-2003-42499169-7234-animechapter4.pdf>, diakses pada tahun 2003.

kedua negara dapat mempererat hubungan kerjasama dalam sektor sosial, budaya dan juga ekonomi.

4. Kerjasama dalam Bidang Pendidikan

Jepang juga merupakan negara yang penting dalam rangka pengembangan sumber daya manusia khususnya dalam bidang pendidikan. Upaya kerjasama di bidang pendidikan ini tampak dalam program pertukaran pelajar, yang mana banyak warga negara Indonesia yang bersekolah di Jepang dan begitu juga sebaliknya, program *research student*, *scholarship*, *training* dan lain sebagainya. Dengan begitu banyak sekali orang yang tertarik dan ingin merasakan serta mengenal Jepang secara langsung.

Japan Business Internship Program atau yang dikenal dengan JBIP Program adalah program *internship* ke Jepang selama satu bulan bagi mahasiswa/i terpilih asal Indonesia. Program ini terlaksana atas kerjasama Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan PT. Okatos Hero Real Estate-Osaka Japan (OHRE) yang pada tahun 2012 merancang *Osaka Business Internship Program* (OBIP) bagi mahasiswa tingkat tiga program studi bahasa Jepang. Awalnya program ini hanya untuk mahasiswa UPI saja, namun pada tahun 2014 ruang lingkup dan pesertanya meluas ke tempat lain, yaitu untuk tempat *training* bukansaja di Osaka namun dilaksanakan juga di Tokyo, dan para peserta magang tidak hanya mahasiswa dari UPI, akan tetapi diikuti juga mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Dengan demikian nama kegiatan ini berubah menjadi *Japan Business Internship Program* (JBIP) (sumber : Berita UPI, 2013).

Dari pemaparan diatas, Hubungan Indonesia dengan Jepang cenderung kepada hubungan ekonomi, Indonesia berperan sebagai supplier bahan mentah bagi Negara maju, sementara Negara maju yang akan mengolah bahan tersebut untuk dijadikan komoditi yang lebih bernilai. Sementara Negara Asia Timur ini berperan memberikan bantuan berupa investasi modal, pinjaman luar negeri, atau bantuan lainnya. Meskipun hubungan antara Indonesia dengan Negara maju tersebut selalu bersifat asimetris yaitu tidak sejajar dan saling melengkapi, namun perolehan yang didapat Indonesia dari Negara tersebut telah banyak membantu proses pembangunan di Indonesia. Hubungan-hubungan yang dikembangkan tentunya mengalami pasang surut dalam prosesnya. Atas dasar persahabatan, hubungan diplomatik yang dijalin harus disadari bahwa kedua negara saling memiliki kepentingan, sehingga selain mewujudkan persahabatan yang harmonis, meningkatkan kewaspadaan antar pihak juga dirasa perlu demi survivalitas negara itu sendiri. Hubungan yang harmonis dengan Negara Asia Timur telah membantu terwujudnya stabilitas dan perdamaian di tingkat regional yang juga akan menciptakan iklim kondusif untuk melakukan pembangunan dan kerjasama. Posisi satu sama lain pun menjadi penting karena bisa berimplikasi terhadap stabilitas maupun eksistensi tiap negara.¹⁷

¹⁷ Bandoro, Bantarto, 1994. "Beberapa Dimensi Hubungan Indonesia-Jepang dan Pelaporan untuk Indonesia", dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 93-124.

C. KERJASAMA INDUSTRI INDONESIA DENGAN JEPANG

Jepang memandang Asia adalah sebagai pasar yang signifikan dan luas dengan prospek yang bagus bagi pertumbuhan di masa depan. Banyak negara di Asia yang telah berhasil melakukan transisi dari substitusi impor ke ekonomi berorientasi ekspor, termasuk Indonesia yang mampu mengatasi krisis moneter tahun 1997-1998. Indonesia mewakili pasar asing yang potensial apabila pertumbuhan ekonomi yang saling berkesinambungan dapat terwujud. Dengan alasan tersebut, Jepang menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasinya di Asia, sementara itu Jepang mengambil keuntungan dari tingkat upah yang murah dan sumberdaya alam yang besar.

Investasi Jepang di Indonesia sendiri secara kumulatif sejak 1990-2007 sebagian besar diinvestasikan di 5 sektor utama yaitu industri logam, mesin, elektronik, alat angkut dan transportasi, industri kimia dan produk farmasi, karet dan plastik serta industri tekstil. Terkait dengan itu, saat ini ada sekitar 1.200 perusahaan Jepang di Indonesia, mayoritas mendominasi sektor Industri manufaktur yang mampu memberikan lapangan pekerjaan tidak kurang dari 200.000 orang Indonesia¹⁸.

¹⁸ IJEPA, "Joint Study Group Report", dimuat dalam <http://www.mofa.go.jp>", diakses pada Mei 2005.

Tabel 2.2 Nilai investasi Jepang tersebut jelasnya tercantum dalam berikut ini :

NO.	Bidang Investasi	Nilai
1	Industri logam, mesin dan produk elektronik	6.46 Milyar
2	Alat angkut dan transportasi	3.57 Milyar
3	Industri kimia dan produk farmasi	2.98 Milyar
4	Industri produk karet dan produk plastik	1.98 Milyar
5	Industri Tekstil	919 Juta

Sumber : BKPM, diolah Departemen Perdagangan

Pada tahun 1995 Badan Lingkungan Hidup Jepang mengadakan penelitian mengenai perkembangan kegiatan perusahaan Jepang di luar negeri yang memperhatikan masalah lingkungan hidup, antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan berjumlah 96 perusahaan, 67,3% bergerak di bidang industri manufakturing, 22,5% di bidang konstruksi, 10,2% di bidang keuangan dan asuransi. Mayoritas perusahaan Jepang yang ada di Indonesia bergerak di bidang industri manufakturing. Menurut data BKPM mengenai perusahaan Jepang yang telah memperoleh izin penanaman modal pada tahun 1995, 97% dari jumlah investasi proyek baru sebesar 2,5 milyar dolar AS merupakan penanaman modal yang berkaitan dengan industri manufaktur. Dengan demikian dapat dilihat bahwa di antara perusahaan-perusahaan Jepang yang menanam modal di Indonesia sebagian besar bergerak di bidang industri manufaktur¹⁹.

¹⁹ “Ceramah Utama Seminar ke-2 dan Kongres ke-7”, ASJI, Depok, 19 Oktober 1995.

Mulai November 1996 sampai Januari 1997, JETRO (*Japan External Trade Organization*) pernah mengadakan penelitian mengenai keadaan perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia yang bergerak di bidang industri manufaktur (Survei mengenai perusahaan-perusahaan Jepang di Asia yang bergerak di bidang industri manufaktur).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa antara 211 perusahaan produsen Jepang yang bekerja sama untuk penelitian tersebut, bagian yang terbesar bergerak di bidang industri tekstil, produk tekstil, kimia, produk medis/obat-obatan, elektronika dan peralatan listrik, masing masing merupakan 15%. Selanjutnya disusul bidang aneka industri 14,2%, dan peralatan pengangkutan 13,3%. Menurut tahun mulainya beroperasi, perusahaan yang mulai beroperasi setelah tahun 1991 adalah terbesar atau 45,1%, dan disusul setelah tahun 1970-an yang merupakan 33,2%. Bila diamati tahun mulai beroperasi menurut bidang industri, pada tahun 1970-an, industri yang berdasarkan bahan baku, yaitu tekstil dan kimia paling banyak sedangkan setelah tahun 1991, perusahaan-perusahaan di bidang industri elektronika dan peralatan listrik paling banyak dan industri yang merupakan produksi suku cadang dan perakitan bertambah²⁰.

Dengan tingginya tingkat industri yang dilakukan oleh Jepang, tentunya hal tersebut menimbulkan peningkatan emisi yang sangat tinggi yang kemudian menimbulkan isu lingkungan. Fenomena hubungan Internasional selama ini didominasi oleh persoalan ideologi, politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Isu mengenai lingkungan hidup kini telah menjadi salah satu isu yang hangat

²⁰ "Overseas Environmental Measures of Japanese Companies, dimuat dalam https://www.env.go.jp/earth/coop/coop/document/oemjc/ind/e/indone_e.pdf". 1997.

dibahas. Karena sejalan dengan kondisi dunia yang dianggap telah berada di era globalisasi, maka faktor lingkungan hidup tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan selain hanya untuk mencapai kepentingan nasional. Isu utama dalam masalah lingkungan ini adalah masalah Global Warming, yang dimana hal tersebut telah mengakibatkan terganggunya stabilitas iklim dunia.